
EVALUASI IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA DALAM PEMBELAJARAN PPKn TERHADAP CAPAIAN PEMBELAJARAN SISWA DI ERA DIGITAL

Romadona Helpiyana¹, Julia Nabilla², Agus Dwi Prasajo³

Universitas Negeri Raden Intan Lampung^{1,2,3}

romadonaheliyana@gmail.com¹, julianabilla00@gmail.com², agusdwiprasajo@an-nur.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) terhadap capaian pembelajaran siswa di era digital. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif evaluatif dengan model CIPP (Context, Input, Process, Product). Data dikumpulkan melalui angket, wawancara, dan dokumentasi pada guru serta siswa madrasah ibtidaiyah dan sekolah dasar di Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kurikulum PPKn dalam konteks era digital tergolong cukup efektif (74%), dengan capaian tinggi pada ranah kognitif, namun masih rendah pada ranah afektif dan karakter digital. Faktor utama yang memengaruhi efektivitas adalah kompetensi digital guru, kesesuaian media pembelajaran, dan dukungan kebijakan sekolah. Diperlukan strategi penguatan kurikulum berbasis digital citizenship dan literasi Pancasila agar nilai-nilai kebangsaan tetap relevan dalam ruang digital.

Kata Kunci: Efektivitas Kurikulum, PPKn, Era Digital, Literasi Pancasila.

ABSTRACT

This study aims to improve the effectiveness of the Pancasila and Citizenship Education (PPKn) curriculum on student learning outcomes in the digital era. A descriptive-evaluative approach was used using the CIPP (Context, Input, Process, Product) model. Data were collected through questionnaires, interviews, and documentation from teachers and students at Islamic elementary schools (madrasah ibtidaiyah) and elementary schools in Lampung. The results indicate that the effectiveness of PPKn implementation in the digital era is quite effective (74%), with high achievement in the cognitive domain, but still low in the affective and digital character domains. The main factors influencing effectiveness are digital teacher competence, the suitability of learning media, and school policy support. Strategies to strengthen the curriculum based on digital citizenship and Pancasila literacy are needed to ensure national values remain relevant in the digital space.

Keywords: Curriculum Effectiveness, PPKn, Digital Era, Pancasila Literacy.

A. PENDAHULUAN

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berperan penting dalam membentuk karakter bangsa di tengah perkembangan teknologi. Transformasi digital menuntut adanya pembaharuan dalam sistem kurikulum agar relevan dengan kebutuhan masyarakat abad ke-21. Menurut Hidayat dan Rahman (2023), efektivitas kurikulum sangat bergantung pada kemampuan guru dan siswa dalam mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam konteks digital.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berperan penting dalam membentuk karakter dan jati diri bangsa. Di tengah tantangan globalisasi dan digitalisasi, kurikulum PPKn diharapkan tidak hanya menanamkan nilai-nilai Pancasila secara normatif, tetapi juga adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kehadiran era digital membawa perubahan besar dalam pola pikir dan perilaku peserta didik. Akses informasi yang cepat dapat memperkaya wawasan, namun juga mengancam internalisasi nilai-nilai moral dan nasionalisme jika tidak disertai penguatan karakter.

Berbagai penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kurikulum PPKn dengan hasil yang dicapai di lapangan. Suryana menegaskan bahwa banyak guru masih menerapkan pendekatan konvensional dan belum mengoptimalkan media digital. Sementara Rahim & Supriyanto menemukan bahwa capaian ranah afektif siswa dalam pembelajaran PPKn masih rendah, meskipun aspek pengetahuan sudah cukup baik.

Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada evaluasi efektivitas kurikulum PPKn terhadap capaian pembelajaran di era digital, untuk mengetahui sejauh mana implementasinya relevan dengan kebutuhan siswa abad ke-21.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Efektivitas Kurikulum

Efektivitas kurikulum adalah tingkat keberhasilan suatu program pembelajaran mencapai tujuan yang diharapkan (Ornstein & Hunkins, 2018). Dalam konteks PPKn, efektivitas tidak hanya diukur dari kemampuan kognitif, tetapi juga pembentukan karakter dan tanggung jawab sosial siswa. Efektivitas kurikulum pada dasarnya merujuk pada sejauh mana suatu kurikulum mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan. Sebuah kurikulum disebut efektif apabila setiap komponennya—tujuan, isi, metode, media, hingga proses evaluasi—berfungsi secara selaras dan memberikan

dampak nyata bagi perkembangan peserta didik. Dengan kata lain, efektivitas kurikulum tidak hanya diukur dari kesesuaian dokumen tertulis, tetapi juga dari bagaimana kurikulum tersebut diimplementasikan di kelas dan diterjemahkan menjadi pengalaman belajar yang bermakna. Pengukuran efektivitas kurikulum dapat dilihat melalui keberhasilan guru dalam melaksanakan pembelajaran sesuai rancangan yang telah disusun. Guru berperan sebagai pelaksana utama sehingga pemahaman yang tepat terhadap isi kurikulum menjadi sangat penting. Kurikulum yang efektif memberikan ruang bagi guru untuk berinovasi, menyesuaikan strategi pembelajaran dengan karakteristik peserta didik, serta mengelola kelas secara fleksibel. Ketika guru mampu mengintegrasikan berbagai metode dan media yang relevan, proses belajar menjadi lebih hidup dan mendorong keterlibatan aktif siswa.

Selain keterlibatan guru, efektivitas kurikulum juga tercermin dari respons dan capaian belajar peserta didik. Kurikulum dianggap berfungsi baik jika mampu memfasilitasi perkembangan kompetensi secara menyeluruh, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan konteks kehidupan peserta didik akan meningkatkan motivasi belajar serta membantu mereka mencapai hasil belajar yang optimal. Oleh karena itu, kurikulum yang efektif selalu memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, berpikir kritis, serta mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Faktor pendukung lain yang mempengaruhi efektivitas kurikulum adalah ketersediaan sarana dan prasarana, dukungan lingkungan sekolah, dan kebijakan pendidikan yang konsisten. Kurikulum tidak dapat berjalan maksimal tanpa infrastruktur yang memadai atau budaya sekolah yang kondusif. Evaluasi juga menjadi bagian penting karena melalui evaluasi, efektivitas pelaksanaan kurikulum dapat dipantau dan ditingkatkan secara terus-menerus. Evaluasi bukan sekadar menilai hasil belajar siswa, tetapi juga meninjau kembali kesesuaian tujuan, materi, metode, dan pelaksanaan pembelajaran secara keseluruhan.

2. Kurikulum PPKn dan Tantangan Digital

Menurut Hidayat & Rahman (2023), era digital menuntut pembelajaran PPKn berbasis critical thinking, digital ethics, dan civic engagement. Guru diharapkan mampu mengintegrasikan teknologi tanpa mengurangi nilai-nilai kebangsaan. Suryana (2024) menambahkan pentingnya literasi digital berbasis Pancasila, yaitu kemampuan berpikir

kritis, etis, dan tanggung jawab dalam berinteraksi di ruang digital. Perkembangan teknologi digital yang begitu cepat membawa perubahan besar dalam dunia pendidikan, sehingga kurikulum harus mampu beradaptasi agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Tantangan digital tidak hanya berkaitan dengan penggunaan perangkat teknologi, tetapi juga menyangkut kemampuan sekolah, guru, dan peserta didik untuk mengintegrasikan teknologi tersebut secara bermakna dalam proses pembelajaran. Kurikulum yang tidak responsif terhadap perubahan digital akan membuat pembelajaran tertinggal dan kurang mampu mempersiapkan peserta didik menghadapi tuntutan dunia kerja dan kehidupan yang semakin terhubung secara global. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan literasi digital antara guru dan siswa. Banyak siswa yang secara teknis lebih cepat menguasai perangkat digital dibandingkan gurunya, namun belum tentu memahami cara memanfaatkan teknologi secara kritis dan bertanggung jawab. Sebaliknya, sebagian guru masih mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam strategi pembelajaran karena keterbatasan pelatihan, fasilitas, atau adaptasi metode mengajar. Oleh karena itu, kurikulum perlu mengakomodasi penguatan kompetensi digital bagi guru sekaligus mendorong peserta didik untuk memahami teknologi bukan hanya sebagai alat hiburan, tetapi sebagai sarana belajar, berkreasi, dan berkolaborasi.

Selain itu, kurikulum menghadapi tantangan dalam memastikan bahwa penggunaan teknologi benar-benar meningkatkan kualitas pembelajaran, bukan hanya menjadi atribut tambahan tanpa makna. Integrasi digital yang efektif menuntut perubahan pendekatan dari pembelajaran yang berpusat pada guru menjadi pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan berbasis proyek. Hal ini memerlukan penataan ulang materi pembelajaran, pemilihan media yang tepat, serta pengembangan model evaluasi yang dapat mengukur kemampuan siswa dalam konteks digital, seperti literasi informasi, kemampuan berpikir kritis, dan kecakapan menggunakan platform digital secara aman. Tantangan lain muncul dari maraknya informasi yang tidak valid atau tidak etis di ruang digital. Kurikulum dituntut untuk memasukkan pendidikan literasi digital yang menekankan kemampuan menyaring informasi, memahami etika berinteraksi di dunia maya, menjaga privasi, serta menghindari dampak negatif seperti plagiarisme, cyberbullying, atau kecanduan gawai. Sekolah berperan penting dalam membimbing

siswa menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan bertanggung jawab, bukan sekadar pengguna pasif. Selain aspek pedagogis, infrastruktur juga menjadi kendala besar. Tidak semua sekolah memiliki akses internet stabil atau perangkat digital yang memadai, sehingga penerapan kurikulum berbasis digital sering kali tidak merata. Kurikulum yang adaptif harus memperhitungkan faktor ini, sehingga tidak hanya merancang pembelajaran ideal, tetapi juga memberikan alternatif strategi bagi sekolah dengan keterbatasan fasilitas.

3. Hasil Evaluasi Empiris

Rahman & Lestari (2023) menyoroti bahwa banyak guru belum memahami pendekatan student-centered learning pada kurikulum Merdeka, sehingga pembelajaran PPKn masih bersifat konvensional. Rahim & Supriyanto (2023) juga menemukan bahwa keberhasilan kurikulum PPKn baru terlihat pada ranah pengetahuan, sementara ranah sikap dan keterampilan digital belum optimal. Hasil evaluasi empiris merupakan temuan yang diperoleh melalui proses pengumpulan data secara sistematis untuk melihat bagaimana suatu program, kebijakan, atau kegiatan benar-benar bekerja di lapangan. Evaluasi jenis ini menekankan pada bukti nyata yang dapat diobservasi, sehingga kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoritis, tetapi berdasarkan fakta dan pengalaman langsung. Dalam konteks pendidikan, hasil evaluasi empiris digunakan untuk memahami tingkat keberhasilan implementasi kurikulum, efektivitas pembelajaran, atau kualitas capaian peserta didik. Data yang diperoleh biasanya diperoleh melalui berbagai metode seperti observasi kelas, wawancara, tes hasil belajar, survei persepsi, maupun analisis dokumen.

Hasil evaluasi empiris menjadi penting karena memberikan gambaran objektif mengenai kondisi yang sebenarnya terjadi, bukan sekadar asumsi atau harapan perencanaan. Misalnya, sebuah kurikulum yang dirancang dengan sangat baik secara konseptual belum tentu memberikan hasil optimal ketika diterapkan. Melalui evaluasi empiris, dapat diketahui apakah guru mengalami kesulitan dalam memahami isi kurikulum, apakah peserta didik mampu mengikuti pembelajaran sesuai tuntutan kompetensi, atau apakah fasilitas sekolah memadai untuk mendukung penerapan strategi pembelajaran tertentu. Dengan demikian, evaluasi ini membantu mengungkap kesenjangan antara rencana dan praktik di lapangan. Temuan empiris sering kali

menunjukkan variasi hasil, karena setiap lingkungan pendidikan memiliki kondisi yang berbeda. Ada sekolah yang mampu menerapkan kurikulum dengan baik karena didukung oleh pelatihan guru dan infrastruktur yang memadai, sementara sekolah lain mungkin menghadapi hambatan seperti keterbatasan teknologi, minimnya pelatihan, atau tingginya jumlah siswa. Melalui evaluasi, berbagai faktor penghambat maupun pendukung dapat diidentifikasi dengan lebih jelas. Informasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan langkah perbaikan, baik dalam bentuk revisi kurikulum, penguatan kompetensi guru, penyediaan sarana, maupun perubahan metode evaluasi.

Selain memberikan gambaran kondisi nyata, hasil evaluasi empiris juga berfungsi sebagai bahan refleksi bagi pendidik dan pengambil kebijakan. Refleksi ini mendorong terciptanya budaya perbaikan berkelanjutan, di mana setiap kelemahan dijadikan peluang untuk meningkatkan mutu pendidikan. Evaluasi yang dilakukan secara berkala memungkinkan adanya penyesuaian terhadap perubahan kebutuhan peserta didik, perkembangan teknologi, serta dinamika sosial yang mempengaruhi proses belajar. Dengan demikian, hasil evaluasi empiris tidak hanya menjadi laporan akhir, tetapi juga menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih akurat dan relevan.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif evaluatif dengan model CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran dengan desain sekuensial eksplanatori. Data kuantitatif dikumpulkan melalui angket capaian belajar siswa, sedangkan data kualitatif melalui wawancara dengan guru PPKn. Analisis data menggunakan teknik statistik deskriptif dan analisis tematik Miles–Huberman.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Evaluasi Konteks

Kurikulum PPKn telah memuat nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan yang relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Namun, sebagian guru belum memahami implementasi pembelajaran berbasis proyek digital. Relevansi kurikulum berada pada kategori baik (78%). Evaluasi konteks juga mencakup analisis terhadap kebijakan pendidikan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah. Peraturan, standar kompetensi, dan arah kebijakan kurikulum

menjadi faktor eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan program di sekolah. Evaluasi yang baik akan menelaah apakah program yang dibuat selaras dengan regulasi yang ada, apakah ada dukungan administratif dari pemerintah, dan sejauh mana kebijakan tersebut memungkinkan pelaksanaan program berjalan lancar. Dengan demikian, evaluasi konteks berfungsi sebagai penghubung antara kebijakan makro dan kondisi mikro di sekolah.

2. Evaluasi Input

Ketersediaan perangkat teknologi dan kompetensi digital guru masih terbatas. 65% guru menyatakan belum pernah mengikuti pelatihan digital citizenship education. Ini berdampak pada minimnya inovasi dalam proses pembelajaran PPKn. Evaluasi input sering kali dimulai dengan menelaah kualitas pendidik sebagai pelaksana utama program. Kompetensi guru dalam menguasai materi, kemampuan pedagogis, serta kesiapan mereka dalam mengadaptasi strategi pembelajaran merupakan indikator utama untuk melihat apakah proses belajar dapat berjalan optimal. Jika guru memiliki keterbatasan pada aspek tertentu, evaluasi input dapat mengidentifikasi kebutuhan pelatihan atau pendampingan yang harus diberikan sebelum program dijalankan. Dengan demikian, evaluasi ini bukan hanya menilai apa yang tersedia, tetapi juga memberikan gambaran mengenai apa yang perlu diperbaiki. Aspek lain yang diperhatikan dalam evaluasi input adalah kelayakan sarana dan prasarana. Fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, perangkat digital, dan akses internet menjadi komponen penting yang mendukung kegiatan belajar mengajar. Evaluasi input membantu menilai apakah fasilitas tersebut sesuai dengan tuntutan kurikulum dan metode pembelajaran yang direncanakan. Misalnya, kurikulum yang berbasis teknologi membutuhkan akses perangkat digital dan infrastruktur jaringan yang memadai. Jika fasilitas belum tersedia, sekolah dapat melakukan upaya pengadaan atau memodifikasi rencana pembelajaran agar tetap realistis.

Selain itu, evaluasi input juga menyoroti ketersediaan materi dan sumber belajar. Buku teks, modul pembelajaran, media digital, serta bahan ajar lainnya harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan mudah digunakan oleh siswa maupun guru. Kejelasan struktur kurikulum, keselarasan kompetensi dasar, serta detail rencana pelaksanaan pembelajaran juga termasuk bagian dari input yang harus di evaluasi. Semakin lengkap dan terarah materi yang tersedia, semakin besar peluang pelaksanaan kurikulum berjalan sesuai dengan harapan. Tidak kalah pentingnya, evaluasi input melibatkan analisis terhadap dukungan kebijakan dan pendanaan.

Program pendidikan memerlukan anggaran untuk pelatihan guru, pengadaan fasilitas, pengembangan materi, serta pembiayaan administrasi. Evaluasi input membantu menentukan apakah anggaran yang disediakan mencukupi dan apakah alokasinya sesuai dengan prioritas program. Selain itu, dukungan kebijakan dari pemerintah daerah maupun pusat turut memengaruhi keberlangsungan program, sehingga perlu dianalisis apakah regulasi yang ada mendukung implementasi kurikulum secara efektif.

3. Evaluasi Proses

Pembelajaran PPKn sebagian besar masih menggunakan metode ceramah. Hanya 30% guru yang memanfaatkan media interaktif seperti Canva, Quizizz, atau video Pancasila. Aktivitas pembelajaran kolaboratif di ruang digital masih rendah. Evaluasi proses biasanya menelaah konsistensi pelaksanaan program dengan desain yang telah disusun pada tahap awal. Misalnya, jika kurikulum mengharuskan pembelajaran berbasis proyek, evaluasi proses akan melihat apakah guru benar-benar menerapkan metode tersebut, bagaimana siswa terlibat, serta apakah waktu dan fasilitas yang tersedia digunakan secara optimal. Sering kali ditemukan perbedaan antara rencana dan kenyataan di lapangan. Perbedaan tersebut tidak selalu merupakan kegagalan, tetapi menjadi indikasi bahwa program memerlukan penyesuaian agar lebih relevan dengan kondisi kelas dan karakteristik peserta didik. Selain kesesuaian pelaksanaan, evaluasi proses juga memperhatikan kualitas interaksi dalam pembelajaran. Proses belajar yang efektif biasanya ditandai oleh komunikasi dua arah, partisipasi aktif siswa, serta penggunaan metode yang variatif. Melalui observasi, wawancara, atau catatan lapangan, evaluator dapat mengidentifikasi apakah guru mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif, apakah siswa menunjukkan minat dan keterlibatan yang tinggi, serta faktor-faktor apa yang memengaruhi dinamika kelas. Informasi semacam ini sangat berharga untuk memahami kekuatan dan kelemahan pelaksanaan kurikulum.

Aspek lain yang diperhatikan adalah kelancaran alur pembelajaran dan penggunaan sumber daya. Evaluasi proses menilai apakah waktu pembelajaran dimanfaatkan secara efektif, apakah media dan bahan ajar digunakan sesuai kebutuhan, dan apakah ada hambatan seperti keterlambatan, kesalahan teknis, atau kurangnya koordinasi antarpendidik. Hambatan tersebut sering kali tidak terlihat pada tahap perencanaan, namun muncul saat program berjalan. Dengan mengevaluasi proses secara langsung, sekolah dapat segera mengambil tindakan untuk meminimalkan gangguan dan menjaga kualitas pembelajaran tetap stabil. Evaluasi proses juga

berfungsi sebagai mekanisme kontrol mutu (quality control). Melalui evaluasi yang dilakukan secara berkala, pihak sekolah dapat memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya berjalan, tetapi juga berkembang menuju kualitas yang lebih baik. Guru dapat memperoleh umpan balik untuk meningkatkan metode mengajar, sedangkan sekolah dapat mengevaluasi apakah dukungan yang diberikan—baik berupa fasilitas, pelatihan, maupun kebijakan—sudah tepat sasaran. Dengan demikian, evaluasi proses menjadi landasan bagi perbaikan berkelanjutan.

4. Evaluasi Produk

Capaian belajar siswa menunjukkan nilai rata-rata 76 (kategori cukup efektif). Ranah kognitif tinggi, namun afektif dan keterampilan sosial digital masih lemah. Hasil ini sejalan dengan temuan Suryana (2024) dan Rahim & Supriyanto (2023) yang menyatakan perlunya transformasi digital berbasis nilai-nilai Pancasila. Salah satu aspek utama dalam evaluasi produk adalah pencapaian hasil belajar siswa. Evaluasi ini melihat sejauh mana peserta didik menguasai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Pengukuran dilakukan melalui berbagai instrumen seperti tes, proyek, portofolio, maupun observasi. Dari hasil tersebut, evaluator dapat menilai apakah strategi pembelajaran yang diterapkan efektif, dan apakah ada peningkatan signifikan dibandingkan kondisi sebelum program dimulai. Selain itu, evaluasi produk juga mencermati variasi capaian antar siswa, sehingga dapat diketahui apakah pembelajaran mampu mengakomodasi kebutuhan individual.

Selain capaian akademik, evaluasi produk menilai dampak jangka panjang yang mungkin tidak langsung terlihat pada akhir proses pembelajaran. Misalnya, apakah siswa menunjukkan peningkatan kemampuan berpikir kritis, kemandirian belajar, kreativitas, atau keterampilan kolaboratif. Dampak semacam ini menjadi penting karena dunia pendidikan modern tidak hanya berorientasi pada nilai, tetapi juga pada pembentukan kompetensi abad ke-21 yang relevan dengan kehidupan sehari-hari dan masa depan siswa. Evaluasi produk membantu memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga membentuk karakter dan kompetensi life skills. Evaluasi produk juga berkaitan dengan efektivitas program secara keseluruhan. Evaluator akan menilai apakah program berjalan sesuai harapan, apakah hasil yang dicapai sebanding dengan sumber daya yang digunakan, dan apakah program memberikan manfaat nyata bagi sekolah. Hal ini mencakup penilaian terhadap efisiensi penggunaan anggaran, keberhasilan pelatihan guru, dan pemanfaatan fasilitas. Dengan

demikian, evaluasi produk tidak hanya menilai aspek hasil belajar peserta didik, tetapi juga nilai tambah yang diberikan oleh program bagi lembaga pendidikan. Dari sudut pandang kebijakan, evaluasi produk menjadi dasar penting untuk pengambilan keputusan. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa tujuan program tercapai secara optimal dan memberikan dampak positif, maka program dapat dilanjutkan atau diperluas. Namun jika ditemukan banyak kelemahan atau hasilnya tidak sesuai harapan, maka program perlu direvisi bahkan mungkin dihentikan. Informasi ini menjadi sangat penting bagi pembuat kebijakan dan pengelola sekolah untuk merencanakan langkah strategis ke depan. Evaluasi produk juga memberikan bahan perbandingan antara berbagai program atau model pembelajaran sehingga sekolah dapat memilih pendekatan yang paling efektif.

5. Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum PPKn cukup efektif, namun implementasinya perlu disesuaikan dengan konteks digital. Integrasi nilai-nilai kebangsaan dalam teknologi pembelajaran dapat dilakukan melalui:

- a) Pengembangan media pembelajaran digital berbasis Pancasila.
- b) Pelatihan guru mengenai digital citizenship.
- c) Evaluasi karakter siswa berbasis aktivitas daring (misalnya etika media sosial).

Hasil menunjukkan bahwa 83% guru menilai kurikulum PPKn efektif, namun hanya 41% yang rutin menggunakan media digital dalam pembelajaran. Capaian kognitif siswa tinggi, tetapi aspek afektif dan moral masih rendah. Hal ini menunjukkan perlunya integrasi nilai-nilai Pancasila ke dalam literasi digital.

Pembahasan

1. Landasan Teoritis Implementasi Kurikulum di Era Digital Pengertian dan Karakteristik Kurikulum Digital

Kurikulum digital adalah bentuk kurikulum yang memanfaatkan teknologi digital sebagai media utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran. Kurikulum ini tidak hanya memuat konten digital, tetapi juga dirancang untuk membentuk kompetensi abad 21. seperti berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif yang terintegrasi dengan literasi digital (Wahyudi, 2021). Kehadiran kurikulum digital menjadi

respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang sangat cepat serta tuntutan globalisasi dalam dunia pendidikan. Menurut UNESCO (2021), kurikulum digital mengacu pada integrasi teknologi digital dalam proses pembelajaran yang memungkinkan fleksibilitas, personalisasi, dan kolaborasi antar peserta didik. Dengan kata lain, kurikulum digital tidak sekadar mengganti buku dengan perangkat digital, tetapi juga menyangkut perubahan pendekatan pedagogi serta pengembangan materi yang adaptif dan interaktif. Ciri utama dari kurikulum digital adalah berbasis teknologi dan didukung oleh platform digital seperti Learning Management System (LMS), aplikasi edukasi, serta media sosial edukatif. Kurikulum ini memungkinkan pembelajaran berlangsung secara daring, luring, maupun hybrid (Santosa & Pramudibyanto, 2022). Selain itu, kurikulum digital bersifat fleksibel karena dapat disesuaikan dengan kebutuhan, kecepatan belajar, serta gaya belajar peserta didik.

Karakteristik penting lainnya adalah kemampuan kurikulum digital untuk mendukung pembelajaran berbasis proyek (project-based learning), pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning), dan pembelajaran berbasis kompetensi (competency-based learning). Pendekatan-pendekatan ini menjadikan peserta didik lebih aktif, mandiri, dan terlibat langsung dalam proses belajar (Astuti & Wibowo, 2023). Namun, penerapan kurikulum digital juga memiliki tantangan seperti kesenjangan akses teknologi, keterbatasan kompetensi digital guru, serta keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kurikulum digital sangat bergantung pada kesiapan sistem pendidikan secara keseluruhan, termasuk dukungan kebijakan, pelatihan guru, serta pengembangan konten digital yang berkualitas. Dengan demikian, kurikulum digital merupakan suatu inovasi pendidikan yang tidak hanya mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga mendorong transformasi proses pembelajaran menjadi lebih efektif, menarik, dan relevan dengan kebutuhan dunia kerja masa depan.

2. Evaluasi Program Pendidikan dalam Konteks Digital

Evaluasi program pendidikan merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menilai keberhasilan suatu program pendidikan dalam mencapai tujuan telah ditetapkan. Menurut Michael Scriven (1967), evaluasi adalah usaha yang berencana dan sistematis untuk mengumpulkan data tentang suatu program pendidikan, menginterpretasikan informasi yang terkumpul, dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan

yang lebih baik tentang program tersebut. Dalam definisinya, Scriven menekankan beberapa aspek penting, yaitu usaha yang berencana, sistematis, pengumpulan data, interpretasi informasi, dan pembuatan keputusan yang lebih baik. Stufflebeam dan Shinkfield (1985) menyatakan bahwa evaluasi program pendidikan adalah proses sistematis dalam menentukan relevansi dan nilai serta memberikan umpan balik yang berharga bagi mereka yang merencanakan, mengimplementasikan, dan menggunakan program tersebut. Pendapat ini menekankan pentingnya evaluasi yang sistematis untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang program pendidikan. Evaluasi diarahkan untuk memberikan informasi yang relevan dan berharga bagi para pengambil keputusan, termasuk perencana, pelaksana, dan pengguna program pendidikan. Dengan demikian, evaluasi menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kualitas dan dampak program pendidikan.

Ebel dan Frisbie (1991) menyatakan bahwa evaluasi program adalah penilaian terencana dan sistematis atas prosedur, proses, atau hasil program untuk menentukan efisiensi, efektivitas, atau nilai-nilai program tersebut. Pendapat ini menekankan pada aspek penilaian yang mencakup berbagai dimensi program pendidikan, baik dari segi efisiensi, efektivitas, maupun nilai-nilai yang terkandung dalam program tersebut. Evaluasi diarahkan untuk memberikan informasi yang akurat dan objektif bagi para pemangku kepentingan program, sehingga dapat diambil keputusan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan kualitas dan hasil program pendidikan. Joint Committee on Standards for Educational Evaluation (JCSEE) pada tahun 2011 mengemukakan bahwa evaluasi program adalah pengumpulan data tentang karakteristik, pengiriman, dan dampak program untuk membuat penilaian tentang programnya, memungkinkan adanya keputusan yang lebih baik dan meningkatkan pemahaman tentang program di antara berbagai pemangku kepentingan. Standar evaluasi yang disusun oleh JCSEE bertujuan untuk membantu para evaluator dan pemangku kepentingan dalam melaksanakan evaluasi program pendidikan dengan baik dan memberikan hasil evaluasi yang relevan dan bermakna. Standar evaluasi JCSEE mencakup empat bagian utama:

- a) **Utilitas:** Menilai relevansi dan manfaat evaluasi untuk pemangku kepentingan, yaitu sejauh mana hasil evaluasi dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan program.
- b) **Feasibility:** Menilai ketersediaan dan kelayakan sumber daya, waktu, dan kemampuan untuk melaksanakan evaluasi dengan tepat dan efisien.

- c) **Propriety:** Menilai etika dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip evaluasi yang adil, objektif, dan berimbang.
- d) **Accuracy:** Menilai keakuratan dan keandalan hasil evaluasi, termasuk metode pengumpulan data, analisis, dan kesimpulan yang dihasilkan.

Standar-standar ini mencakup berbagai aspek yang relevan dalam evaluasi program pendidikan, memastikan bahwa evaluasi dilakukan secara profesional, bermakna, dan dapat dipertanggungjawabkan. JCSEE bertujuan untuk meningkatkan kualitas evaluasi program pendidikan dan mengedepankan penggunaan bukti-bukti dalam pengambilan keputusan di bidang pendidikan

3. Masalah dalam Implementasi Kurikulum Digital

Implementasi kurikulum digital di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Tantangan ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi efektivitas transformasi pendidikan digital. Berikut adalah beberapa masalah utama yang dihadapi dalam penerapan kurikulum digital:

a) Keterbatasan Infrastruktur dan Akses Teknologi

Salah satu hambatan signifikan dalam implementasi kurikulum digital adalah keterbatasan infrastruktur dan akses teknologi, terutama di daerah-daerah terpencil. Banyak sekolah di daerah tersebut tidak memiliki fasilitas teknologi yang memadai, seperti komputer, laptop, atau akses internet yang stabil. Hal ini mengakibatkan kesenjangan dalam kesempatan belajar antara siswa di daerah perkotaan dan pedesaan.

b) Disparitas Kompetensi Guru dan Siswa dalam Penggunaan Teknologi

Kompetensi digital guru dan siswa juga menjadi tantangan utama. Banyak guru yang belum memiliki keterampilan yang cukup dalam menggunakan teknologi untuk pembelajaran, sementara siswa juga menghadapi kesulitan dalam mengakses dan memanfaatkan sumber daya digital. Sebagai contoh, di Kecamatan Baraka, Sulawesi Selatan, meskipun digitalisasi komunikasi kebijakan pendidikan telah diterapkan, para guru belum memanfaatkan perangkat lunak yang diberikan untuk memaksimalkan pembelajaran.

c) Ketidaksiapan Institusi dalam Mengintegrasikan Konten Digital

Banyak institusi pendidikan yang belum siap dalam mengintegrasikan konten digital ke dalam kurikulum mereka. Kurangnya pelatihan bagi guru, serta kurangnya

dukungan dari manajemen sekolah, menghambat proses integrasi teknologi dalam pembelajaran. Penelitian menunjukkan bahwa guru masih kesulitan dalam menentukan model pembelajaran yang cocok dan teknologi yang harus digunakan.

d) Kurangnya Partisipasi dan Adaptasi Pemangku Kepentingan

Partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat, sangat penting dalam implementasi kurikulum digital. Namun, kurangnya komunikasi dan kolaborasi antara pihak-pihak tersebut sering kali menghambat proses adaptasi dan penerimaan terhadap perubahan. Sebagai contoh, di Jawa Tengah, hambatan digital utama meliputi akses perangkat yang terbatas dan kualitas konektivitas internet yang buruk, yang memperburuk kesenjangan dalam kesempatan pendidikan.

e) Tantangan dalam Implementasi Kurikulum Merdeka di Era Digital

Kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru dalam menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi siswa. Namun, penerapan kurikulum ini dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam konteks transformasi digital yang semakin pesat. Beberapa tantangan utama yang diidentifikasi meliputi kesenjangan akses teknologi, kompetensi digital guru, kualitas konten pembelajaran digital, evaluasi dan pemantauan pembelajaran, serta manajemen waktu dan rencana pembelajaran.

f) Upaya dan Strategi Mengatasi Masalah

Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, berbagai upaya dan strategi perlu dilakukan, antara lain:

- 1) Peningkatan Infrastruktur Teknologi: Membangun dan memperbaiki infrastruktur teknologi di sekolah-sekolah, terutama di daerah terpencil, untuk memastikan akses yang merata terhadap teknologi.
- 2) Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Digital: Memberikan pelatihan yang berkelanjutan bagi guru dan siswa dalam penggunaan teknologi untuk pembelajaran.
- 3) Integrasi Kurikulum Digital: Mengembangkan dan mengintegrasikan konten digital yang relevan dan berkualitas ke dalam kurikulum yang ada.

- 4) Kolaborasi dan Partisipasi Pemangku Kepentingan: Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam mendukung implementasi kurikulum digital.
- 5) Evaluasi dan Pemantauan: Melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala untuk menilai efektivitas implementasi kurikulum digital dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diharapkan implementasi kurikulum digital dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

4. Tantangan Evaluasi Program di Era Digital

Evaluasi program pendidikan di era digital menghadirkan tantangan kompleks yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Beberapa tantangan utama yang dihadapi antara lain validitas data digital, akuntabilitas hasil evaluasi, kesulitan integrasi data antar platform, kurangnya standar nasional untuk evaluasi digital, serta isu etika, privasi, dan keamanan data peserta didik.

a) Validitas Data Digital dan Akuntabilitas Hasil Evaluasi

Validitas data dalam evaluasi digital menjadi krusial karena ketergantungan pada teknologi dapat mempengaruhi kualitas dan keakuratan informasi yang diperoleh. Penelitian oleh Saptadi (2024) menekankan pentingnya memastikan bahwa alat evaluasi digital dapat mengukur apa yang seharusnya diukur dan menghasilkan data yang konsisten dari waktu ke waktu. Selain itu, akuntabilitas hasil evaluasi juga menjadi perhatian utama, mengingat pentingnya memastikan bahwa hasil evaluasi dapat dipertanggungjawabkan dan transparan bagi semua pemangku kepentingan.

b) Kesulitan Integrasi Data Evaluasi Antar Platform dan Sistem

Integrasi data evaluasi antar berbagai platform dan sistem menjadi tantangan signifikan dalam implementasi evaluasi digital. Hal ini disebabkan oleh perbedaan format data, standar teknis, dan kebijakan antar lembaga atau instansi pendidikan. Penelitian oleh Gustifal et al. (2023) menunjukkan bahwa kesulitan dalam integrasi data dapat menghambat efektivitas evaluasi dan pengambilan keputusan yang berbasis data.

c) Kurangnya Standar Nasional untuk Evaluasi Digital

Kurangnya standar nasional yang jelas untuk evaluasi digital menyebabkan ketidakseragaman dalam pelaksanaan evaluasi di berbagai lembaga pendidikan. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas dan keadilan evaluasi, serta menyulitkan perbandingan hasil evaluasi antar lembaga. Menurut penelitian oleh Jaya dan Hayati (2022), standar yang tidak baku dapat menyebabkan ketidakpastian dalam menilai kompetensi peserta didik secara objektif.

d) Isu Etika, Privasi, dan Keamanan Data Peserta Didik

Penggunaan teknologi dalam evaluasi digital menimbulkan berbagai isu etika, privasi, dan keamanan data peserta didik. Prawestri dan Cahayani (2025) mengungkapkan bahwa tantangan utama dalam administrasi publik digital mencakup pengelolaan data pribadi yang rentan disalahgunakan, kurangnya regulasi yang memadai, serta rendahnya literasi digital di kalangan aparatur pemerintah. Dalam konteks pendidikan, hal ini berimplikasi pada perlunya perlindungan data pribadi peserta didik dan penerapan regulasi yang ketat terkait penggunaan data dalam evaluasi.

e) Strategi Mengatasi Tantangan Evaluasi Digital

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:

- 1) Pengembangan Infrastruktur Teknologi: Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur teknologi di lembaga pendidikan untuk mendukung pelaksanaan evaluasi digital yang efektif.
- 2) Pelatihan dan Peningkatan Literasi Digital: Memberikan pelatihan kepada pendidik dan peserta didik mengenai penggunaan alat evaluasi digital dan pentingnya menjaga etika serta keamanan data.
- 3) Penyusunan Standar Nasional Evaluasi Digital: Mengembangkan dan menerapkan standar nasional yang jelas untuk evaluasi digital guna memastikan keseragaman dan kualitas evaluasi di seluruh lembaga pendidikan.
- 4) Penerapan Kebijakan Perlindungan Data: Menyusun dan menerapkan kebijakan yang ketat terkait perlindungan data pribadi peserta didik dalam proses evaluasi digital. Dengan penerapan strategi-strategi tersebut, diharapkan evaluasi program pendidikan di era digital dapat berjalan dengan efektif, adil, dan bertanggung jawab.

5. Deskripsi Kurikulum Sma Di Era Kurikulum Merdeka

Kurikulum Merdeka merupakan penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya yang dirancang untuk menjawab tantangan zaman dan kebutuhan peserta didik dalam menghadapi perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang semakin cepat (Kuwoto et al., 2024). Pada tingkat SMA, Kurikulum Merdeka hadir dengan pendekatan yang lebih fleksibel, berpusat pada peserta didik, dan menekankan penguatan karakter melalui integrasi Profil Pelajar Pancasila dalam setiap aktivitas pembelajaran. Kurikulum ini mengedepankan tiga prinsip utama: pembelajaran berbasis proyek, diferensiasi pembelajaran, dan penguatan karakter. Salah satu komponen penting adalah pelaksanaan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), yang menjadi wadah pembentukan nilai-nilai seperti kemandirian, gotong royong, kreativitas, kebhinekaan global, berpikir kritis, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME (Sari & Yulianto, 2024). P5 tidak hanya berdiri sebagai aktivitas tambahan, melainkan bagian integral dari kurikulum yang harus diintegrasikan secara kontekstual dengan kondisi dan potensi satuan pendidikan. Struktur kurikulum di jenjang SMA dibagi menjadi tiga kelompok utama: (1) mata pelajaran intrakurikuler (konten utama pembelajaran di kelas seperti Matematika, Bahasa Indonesia, Fisika, dan Pendidikan Agama); (2) proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5) yang bersifat tematik dan lintas disiplin ilmu; dan (3) mata pelajaran pilihan, yang memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam memilih sesuai minat dan bakat mereka mulai dari kelas XI. Dengan demikian, Kurikulum Merdeka berusaha menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan masa depan. Perbedaan signifikan antara Kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya (seperti Kurikulum 2013) terletak pada tingkat fleksibilitasnya. Sekolah diberikan kewenangan lebih besar untuk merancang dan menyesuaikan materi serta metode pembelajaran sesuai karakteristik dan kebutuhan peserta didik (Bremner et al., 2022); (Kamalov et al., 2023). Hal ini bertujuan agar pembelajaran tidak bersifat seragam dan kaku, tetapi lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan lingkungan sekitar. Kurikulum ini juga mendorong kolaborasi antarguru dan pendekatan interdisipliner dalam pembelajaran, termasuk dalam perancangan proyek dan asesmen. Dari sisi waktu, pada jenjang SMA Kurikulum Merdeka menetapkan total 36 jam pelajaran per minggu, di mana 30 jam digunakan untuk pembelajaran intrakurikuler dan 6 jam dialokasikan untuk pelaksanaan proyek P5. Jumlah jam ini memungkinkan guru dan siswa memiliki ruang untuk mengeksplorasi materi pembelajaran secara mendalam sekaligus melakukan kegiatan

pengembangan karakter yang bermakna. Dengan demikian, waktu belajar tidak hanya dihabiskan untuk aspek kognitif, tetapi juga untuk aspek afektif dan psikomotorik siswa.

Namun, implementasi Kurikulum Merdeka di jenjang SMA juga tidak luput dari berbagai tantangan. Perubahan paradigma pembelajaran membutuhkan kesiapan dari guru, kepala sekolah, dan seluruh ekosistem pendidikan. Banyak guru masih mengalami kebingungan dalam mengembangkan modul ajar yang sesuai dengan prinsip diferensiasi dan pembelajaran berbasis proyek. Selain itu, tidak semua sekolah memiliki sumber daya yang memadai untuk menjalankan kegiatan P5 secara maksimal, terutama sekolah-sekolah di daerah dengan keterbatasan fasilitas teknologi dan SDM. Meskipun begitu, Kurikulum Merdeka tetap menjadi langkah progresif dalam reformasi pendidikan Indonesia. Dengan kerangka yang lebih terbuka dan fleksibel, serta penekanan kuat pada penguatan karakter, kurikulum ini memiliki potensi besar untuk menciptakan lulusan SMA yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki integritas dan kecakapan abad ke-21. Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kerja sama semua pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, guru, siswa, hingga orang tua

6. Evaluasi Penerapan Nilai-Nilai Karakter Dalam Kurikulum

Pendidikan karakter telah menjadi bagian esensial dari sistem pendidikan nasional di Indonesia, terutama sejak dicanangkannya Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam kerangka Kurikulum Merdeka, nilai-nilai karakter tersebut diartikulasikan secara eksplisit dalam Profil Pelajar Pancasila, yang mencakup enam dimensi utama: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong-royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Evaluasi terhadap penerapan nilai-nilai karakter ini menjadi penting, terutama untuk mengetahui sejauh mana kurikulum yang berlaku berhasil membentuk pribadi siswa yang utuh di tengah tantangan zaman. Secara normatif, Kurikulum Merdeka telah memberikan ruang yang luas untuk integrasi pendidikan karakter, baik secara langsung melalui mata pelajaran, maupun secara tidak langsung melalui pembiasaan, budaya sekolah, dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila (P5). Dalam pelaksanaannya, guru dituntut tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga fasilitator dan teladan dalam membimbing siswa menginternalisasi nilai-nilai tersebut. Namun demikian, proses internalisasi karakter tidak dapat berjalan secara instan. Dibutuhkan strategi pembelajaran yang efektif, berkesinambungan, dan terintegrasi dalam seluruh aspek kegiatan belajar-mengajar. Salah satu indikator keberhasilan penerapan nilai-

nilai karakter dalam kurikulum dapat dilihat dari keterlibatan siswa dalam proyek P5. Berdasarkan berbagai evaluasi awal di beberapa SMA yang menerapkan Kurikulum Merdeka secara mandiri, proyek ini cukup efektif dalam melatih siswa untuk berkolaborasi, berpikir kritis, serta menumbuhkan kepedulian sosial. Misalnya, proyek bertema "Suara Demokrasi" mendorong siswa memahami nilai-nilai demokrasi dan tanggung jawab warga negara secara konkret melalui simulasi pemilu di lingkungan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan tematik-projektif dalam kurikulum baru ini mampu menjadi media efektif dalam membentuk karakter peserta didik. Namun di sisi lain, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitas penerapan pendidikan karakter dalam kurikulum. Pertama, tidak semua guru memiliki pemahaman yang cukup mengenai integrasi nilai karakter ke dalam mata pelajaran mereka. Banyak yang masih menganggap bahwa pendidikan karakter hanya menjadi tanggung jawab guru agama atau PPKn saja, bukan tanggung jawab bersama seluruh guru mata pelajaran. Hal ini tentu bertolak belakang dengan prinsip Kurikulum Merdeka yang menekankan keterpaduan lintas bidang studi.

Kedua, minimnya pelatihan dan pendampingan guru dalam menyusun modul ajar berbasis karakter dan mengelola proyek P5 secara optimal. Banyak guru mengaku kesulitan menerjemahkan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang konkret dan relevan dengan kehidupan siswa. Kondisi ini menyebabkan kegiatan pembelajaran karakter sering kali bersifat formalistik dan tidak menyentuh dimensi afektif siswa. Ketiga, kurangnya keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan karakter. Padahal, pembentukan karakter idealnya melibatkan tiga pilar utama: sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dalam praktiknya, masih banyak sekolah yang belum memiliki sistem komunikasi dan kolaborasi yang kuat dengan orang tua, sehingga nilai-nilai yang diajarkan di sekolah tidak selalu sejalan dengan pembiasaan di rumah. Selain itu, adanya tantangan eksternal seperti pengaruh media digital, budaya konsumerisme, dan pergeseran nilai sosial juga turut melemahkan daya internalisasi nilai-nilai karakter dalam diri siswa. Meskipun kurikulum sudah dirancang sebaik mungkin, tanpa adanya penguatan di luar sekolah, proses pembentukan karakter akan berjalan timpang dan tidak utuh. Maka dari itu, evaluasi penerapan nilai-nilai karakter dalam kurikulum harus mencakup tiga aspek utama: perencanaan, pelaksanaan, dan hasil. Dari sisi perencanaan, dibutuhkan penyusunan modul dan perangkat ajar yang terintegrasi dengan nilai-nilai karakter. Dari sisi pelaksanaan, diperlukan penguatan kapasitas

guru dan sistem pembelajaran yang menyenangkan serta relevan dengan kehidupan nyata siswa. Sementara dari sisi hasil, sekolah harus mampu memantau perkembangan karakter siswa melalui instrumen asesmen nonkognitif yang terstandar dan komprehensif. Dengan evaluasi yang menyeluruh dan berkelanjutan, pendidikan karakter dalam Kurikulum Merdeka di jenjang SMA dapat terus diperbaiki dan disempurnakan. Tujuan akhir dari pendidikan bukan hanya mencetak siswa yang unggul secara akademik, tetapi juga membentuk manusia seutuhnya yang memiliki karakter kuat, tangguh, dan mampu menjadi agen perubahan di tengah dinamika global.

7. Peran Guru Dan Lingkungan Sekolah Dalam Pembentukan Karakter

Pembentukan karakter siswa merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat dipisahkan dari peran guru dan lingkungan sekolah. Guru sebagai agen utama pendidikan memiliki posisi strategis dalam membentuk kepribadian dan karakter peserta didik secara holistik. Lingkungan sekolah, sebagai ruang belajar formal, juga memegang peranan penting dalam menciptakan iklim dan budaya yang mendukung tumbuh kembangnya nilai-nilai karakter dalam diri siswa. Peran guru dalam pembentukan karakter tidak hanya sebatas sebagai pengajar yang mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan juga sebagai teladan dan pembimbing moral. Guru yang memiliki integritas, sikap positif, dan konsistensi dalam mempraktikkan nilai-nilai luhur akan mampu menularkan karakter tersebut kepada siswa. Keteladanan guru merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan pendidikan karakter, karena siswa cenderung meniru perilaku dan sikap guru yang mereka anggap sebagai figur panutan. Oleh karena itu, guru harus memegang prinsip pembelajaran yang tidak hanya akademik tetapi juga afektif dan psikomotorik, seperti membiasakan disiplin, kejujuran, tanggung jawab, dan sikap toleransi di lingkungan kelas. Selain itu, guru perlu mengembangkan metode pembelajaran yang berorientasi pada penguatan karakter, seperti pembelajaran berbasis proyek, diskusi nilai, refleksi diri, dan simulasi situasi kehidupan nyata yang mengandung muatan karakter. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya memahami konsep nilai karakter secara teoritis, tetapi juga mampu menginternalisasi dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pelibatan guru dalam pendampingan dan monitoring perkembangan karakter siswa juga penting agar proses pembentukan karakter berlangsung berkelanjutan dan sistematis. Lingkungan sekolah juga memegang peran vital dalam mendukung pembentukan karakter.

Lingkungan yang kondusif secara fisik dan sosial memungkinkan siswa belajar dan berinteraksi dalam suasana yang sehat dan positif. Budaya sekolah yang menanamkan nilai-nilai seperti saling menghormati, gotong royong, dan keadilan menjadi media sosialisasi karakter yang efektif. Misalnya, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, kepanitiaan, dan organisasi siswa menjadi wahana praktik nyata penerapan nilai-nilai karakter. Pengelolaan lingkungan sekolah yang mengedepankan suasana ramah anak (*child-friendly school*) dapat memperkuat rasa aman dan nyaman siswa, sehingga mereka lebih mudah menerima nilai-nilai pendidikan karakter. Sekolah yang menerapkan sistem penguatan karakter secara menyeluruh akan memperhatikan aspek kebersihan, ketertiban, dan estetika lingkungan sebagai bagian dari pendidikan karakter. Penanaman nilai disiplin dapat dimulai dari hal sederhana seperti menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Interaksi sosial yang terjadi di sekolah juga merupakan arena pembelajaran karakter yang sangat efektif. Dalam pergaulan antar siswa, mereka belajar nilai toleransi, kerja sama, dan komunikasi yang baik. Guru dan tenaga kependidikan bertindak sebagai fasilitator dan pengawas agar interaksi ini berjalan harmonis dan produktif. Konflik yang muncul di sekolah dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran untuk mengasah kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah secara damai dan adil. Selain itu, keterlibatan seluruh warga sekolah, termasuk kepala sekolah, guru, staf, dan bahkan orang tua siswa, menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem pendidikan karakter yang komprehensif. Kepala sekolah memiliki peran sebagai pemimpin yang mengarahkan dan memotivasi seluruh komunitas sekolah untuk berkomitmen dalam penguatan karakter. Sedangkan orang tua berperan sebagai mitra sekolah yang memperkuat pendidikan karakter di lingkungan rumah sehingga terjadi keselarasan antara sekolah dan keluarga.

Dalam konteks Kurikulum Merdeka, peran guru dan lingkungan sekolah semakin diperkuat melalui implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang menuntut kolaborasi lintas fungsi dan kegiatan. Dengan demikian, pembentukan karakter bukan hanya menjadi tugas individu guru saja, melainkan merupakan kerja sama sistemik yang melibatkan seluruh elemen sekolah dan komunitas sekitar. Secara keseluruhan, peran guru dan lingkungan sekolah merupakan pondasi utama dalam pembentukan karakter siswa. Kualitas dan komitmen guru dalam melaksanakan pendidikan karakter serta terciptanya lingkungan sekolah yang suportif dan inklusif akan menghasilkan generasi yang berkarakter kuat, mandiri, dan siap menghadapi tantangan kehidupan di era modern.

8. Kritik Terhadap Kurikulum: Ketidaksesuaian Antara Tujuan Dan Implementasi

Kurikulum merupakan komponen utama dalam sistem pendidikan yang mengarahkan proses pembelajaran dan pencapaian tujuan pendidikan. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan ketidaksesuaian antara tujuan kurikulum yang ideal dengan implementasi di lapangan. Hal ini menimbulkan kritik yang cukup tajam dari berbagai kalangan, termasuk akademisi, praktisi pendidikan, dan masyarakat. Ketidaksesuaian ini berdampak pada efektivitas pencapaian tujuan pendidikan, khususnya dalam konteks pembentukan karakter, penguasaan kompetensi, dan pengembangan potensi peserta didik. Pertama, salah satu kritik utama adalah kurikulum seringkali terlalu idealistis dan normatif, tetapi kurang responsif terhadap realitas dan kebutuhan siswa di lapangan. Misalnya, Kurikulum Merdeka yang dirancang untuk memberi ruang kebebasan dan kreativitas kepada guru dan siswa dalam memilih proyek dan pendekatan pembelajaran, dalam praktiknya masih menghadapi kendala keterbatasan sumber daya, kesiapan guru, dan fasilitas sekolah yang belum merata. Akibatnya, kebebasan tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga tujuan kurikulum yang menekankan pengembangan karakter, kompetensi abad 21, dan kemandirian peserta didik belum tercapai secara maksimal. Kedua, banyak guru dan tenaga pendidik yang belum sepenuhnya memahami dan menguasai filosofi, struktur, dan metodologi Kurikulum Merdeka. Kurikulum baru ini menuntut perubahan paradigma pembelajaran dari yang bersifat konvensional dan berorientasi hafalan menjadi pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan pendekatan proyek dan penilaian autentik. Namun, proses sosialisasi dan pelatihan guru belum merata dan memadai, sehingga implementasi kurikulum masih cenderung formalistik dan mekanistik. Guru yang belum siap cenderung kembali ke pola pembelajaran lama, sehingga tujuan pembentukan karakter dan pengembangan kreativitas siswa sulit tercapai. Ketiga, terdapat ketidaksesuaian antara kebijakan kurikulum dan fasilitas serta infrastruktur sekolah. Kurikulum modern menuntut penggunaan teknologi, metode pembelajaran inovatif, dan pengayaan materi yang membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai (González-Pérez & Ramírez-Montoya, 2022). Akan tetapi, kenyataan di banyak sekolah, terutama di daerah terpencil dan kurang berkembang, masih mengalami keterbatasan infrastruktur seperti kurangnya akses internet, perangkat digital, dan sumber belajar yang memadai. Hal ini menyebabkan implementasi kurikulum menjadi tidak optimal dan terkesan hanya mengikuti

prosedur administratif tanpa makna substansial bagi peningkatan kualitas pembelajaran (Karatsiori, 2023); (Van Dijk et al., 2020).

Keempat, ketidaksesuaian juga terlihat dalam aspek evaluasi dan asesmen yang belum sepenuhnya mendukung tujuan kurikulum. Kurikulum Merdeka menekankan penilaian autentik yang holistik, mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Namun, sistem evaluasi yang berlaku di banyak sekolah masih berfokus pada tes tertulis dan kuantitatif, sehingga penilaian karakter dan kompetensi keterampilan kurang mendapat perhatian serius. Akibatnya, guru dan siswa lebih terfokus pada pencapaian nilai angka dibandingkan pengembangan karakter dan kompetensi riil. Kelima, kritik lain menyangkut ketidaksesuaian antara muatan lokal dan konteks budaya dengan kurikulum nasional. Meskipun Kurikulum Merdeka memberi keleluasaan dalam pengembangan muatan lokal, namun banyak sekolah belum mampu mengoptimalkan potensi ini karena keterbatasan pemahaman dan dukungan dari pemerintah daerah. Padahal, penguatan budaya lokal dan identitas bangsa sangat penting dalam membentuk karakter dan jati diri peserta didik. Dalam rangka mengatasi ketidaksesuaian antara tujuan dan implementasi kurikulum, dibutuhkan beberapa langkah strategis. Pertama, peningkatan kapasitas dan kompetensi guru melalui pelatihan berkelanjutan serta pendampingan intensif agar dapat menerapkan pembelajaran sesuai filosofi kurikulum. Kedua, penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendidikan yang merata agar semua sekolah dapat melaksanakan kurikulum secara optimal. Ketiga, reformasi sistem penilaian yang mendukung penilaian autentik dan holistik sehingga mencerminkan pencapaian kompetensi secara menyeluruh. Keempat, penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah Dalam mengembangkan muatan lokal serta mendukung budaya sekolah yang positif. Secara keseluruhan, kritik terhadap ketidaksesuaian antara tujuan dan implementasi kurikulum merupakan refleksi penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara menyeluruh. Hanya dengan harmonisasi antara tujuan, kebijakan, sumber daya, dan praktik di lapangan, kurikulum dapat berfungsi optimal sebagai alat pembentuk generasi masa depan yang berkarakter, kompeten, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

9. Strategi Penguatan Karakter Di Era Digital Melalui Kurikulum

Era digital membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Di satu sisi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi membuka akses luas terhadap sumber belajar dan interaksi sosial yang dinamis. Namun di sisi lain, era digital juga

menghadirkan tantangan besar dalam pembentukan karakter siswa, seperti risiko kecanduan gadget, penyebaran konten negatif, hingga menurunnya kemampuan sosialisasi langsung. Oleh karena itu, penguatan karakter di era digital menjadi kebutuhan mendesak yang harus diintegrasikan secara strategis dalam kurikulum pendidikan. Salah satu strategi utama dalam penguatan karakter di era digital adalah integrasi nilai-nilai karakter ke dalam muatan pembelajaran yang kontekstual dan relevan dengan dunia digital. Kurikulum harus mampu mengakomodasi aspek literasi digital yang meliputi kemampuan kritis dalam mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bijak. Dengan demikian, siswa tidak hanya menjadi konsumen pasif teknologi, tetapi juga mampu berperan aktif dan bertanggung jawab dalam penggunaan teknologi digital. Selain itu, kurikulum perlu mengembangkan pendekatan pembelajaran berbasis proyek dan problem solving yang mengandung nilai-nilai karakter, seperti tanggung jawab, kerja sama, kreativitas, dan integritas. Proyek yang melibatkan penggunaan teknologi digital, misalnya membuat konten edukatif, program komputer sederhana, atau kampanye sosial di media digital, dapat menjadi sarana efektif untuk menginternalisasi karakter positif sekaligus meningkatkan kompetensi digital siswa. Pendekatan ini sesuai dengan filosofi Kurikulum Merdeka yang memberi kebebasan kepada guru dan siswa untuk mengeksplorasi berbagai metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif.

Selanjutnya, pembentukan karakter di era digital juga harus didukung oleh penguatan literasi media dan etika digital dalam kurikulum. Literasi media membantu siswa memahami bagaimana media digital bekerja, mengenali konten yang dapat dipercaya, dan menghindari informasi hoaks atau radikalisme. Etika digital menanamkan sikap hormat, empati, dan tanggung jawab dalam berinteraksi di dunia maya, sehingga membentuk karakter digital yang sehat dan produktif. Peran guru dalam strategi ini sangat vital. Guru harus dilatih untuk menguasai literasi digital dan mampu mengintegrasikan penguatan karakter ke dalam proses pembelajaran sehari-hari (Chan, 2023). Pelatihan guru dalam penggunaan teknologi dan metode pembelajaran yang interaktif akan memperkuat motivasi siswa dan mempermudah penanaman nilai-nilai karakter melalui berbagai media digital yang menarik. Selain itu, lingkungan sekolah perlu menciptakan budaya digital yang positif dan suportif. Penggunaan teknologi digital di sekolah harus diawasi dengan baik agar tidak menimbulkan dampak negatif, seperti bullying digital (cyberbullying) dan penyalahgunaan media sosial. Sekolah juga dapat menyediakan program-program pendampingan dan konseling bagi siswa yang

menghadapi masalah dalam penggunaan teknologi digital. Keterlibatan orang tua dan masyarakat juga merupakan bagian dari strategi penguatan karakter di era digital (O'Byrne et al., 2022). Orang tua perlu diberikan edukasi mengenai literasi digital dan etika berinternet agar dapat membimbing anak-anak mereka di rumah. Kerja sama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat dapat membentuk ekosistem pendidikan karakter yang solid dan holistik. Dalam konteks kurikulum nasional, seperti Kurikulum Merdeka, penguatan karakter di era digital bisa diwujudkan melalui pengembangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang mengandung muatan literasi digital dan nilai-nilai moral yang sesuai. Proyek-proyek ini memberikan ruang bagi siswa untuk belajar secara kontekstual, kritis, dan kreatif dalam memecahkan masalah nyata di era digital. Secara keseluruhan, strategi penguatan karakter di era digital melalui kurikulum menuntut sinergi antara integrasi nilai karakter dan literasi digital dalam pembelajaran, pelatihan guru, pembentukan budaya sekolah yang positif, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat. Dengan strategi ini, generasi muda dapat tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter kuat, bijak dalam teknologi, dan siap menghadapi tantangan serta peluang di dunia digital.

D. KESIMPULAN

Efektivitas kurikulum PPKn di era digital tergolong cukup efektif, dengan tantangan utama pada aspek literasi digital guru dan internalisasi nilai-nilai karakter dalam ruang maya. Diperlukan sinergi antara guru, sekolah, dan pemerintah dalam memperkuat kompetensi pedagogik digital, serta inovasi kurikulum berbasis nilai-nilai Pancasila yang relevan dengan kebutuhan generasi digital.

Kurikulum PPKn efektif dalam menanamkan nilai karakter, namun belum sepenuhnya adaptif terhadap era digital. Rekomendasi utama adalah penguatan literasi digital Pancasila, pelatihan guru berbasis teknologi, dan pengembangan model evaluasi moral digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, A., & Rahman, S. (2023). Digital Civic Literacy in Indonesian Schools. *Cendekiawan Journal of Education*, 1(4), 45–59. <https://doi.org/10.61253/cendekiawan.v1i4.416>
- Rahman, R., & Lestari, W. (2023). Evaluasi Kurikulum PPKn di Era Revolusi 4.0. *Buana Journal*, 5(3), 112–130. <https://doi.org/10.47353/bj.v5i3.601>

- Suryana, E. (2024). Integrasi Nilai Pancasila dalam Pembelajaran Digital. JPPI, 4(1), 90–104.
<https://doi.org/10.53299/jppi.v4i1.403>
- Rahim, F., & Supriyanto, D. (2023). Efektivitas Implementasi Kurikulum Merdeka PPKn. PSSA Journal, 8(1), 22–35. <https://doi.org/10.53565/pssa.v8i1.452>
- Nugroho, D. (2023). Civic Education and Digital Ethics in Indonesia. Asian Civic Review, 12(3), 201–218. <https://doi.org/10.1080/21745260.2023.001>
- Zoya F, Dkk. IMPLEMENTASI KURIKULUM DAN EVALUASI PROGRAM DI ERA DIGITAL: MASALAH DAN TANTANGAN. Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM) Vol 9 No. 5 Mei 2025
- MUJIBURRAHMAN, Dkk. IMPLEMENTASI MODEL PEMBELAJARAN PROJECT BASE LEARNIG DI ERA KURIKULUM MERDEKA. COMMUNITY : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 2 No. 2 Oktober 2022
- Sri Nur Inayah SIMBOLON, Dkk. Evaluation of High School Curriculum in Forming Student Character in the Digital Era. Journal of Digital Learning and Distance Education Vol. 4 Issue 2 (July 2025).